



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 182/B.07/HK/2024**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

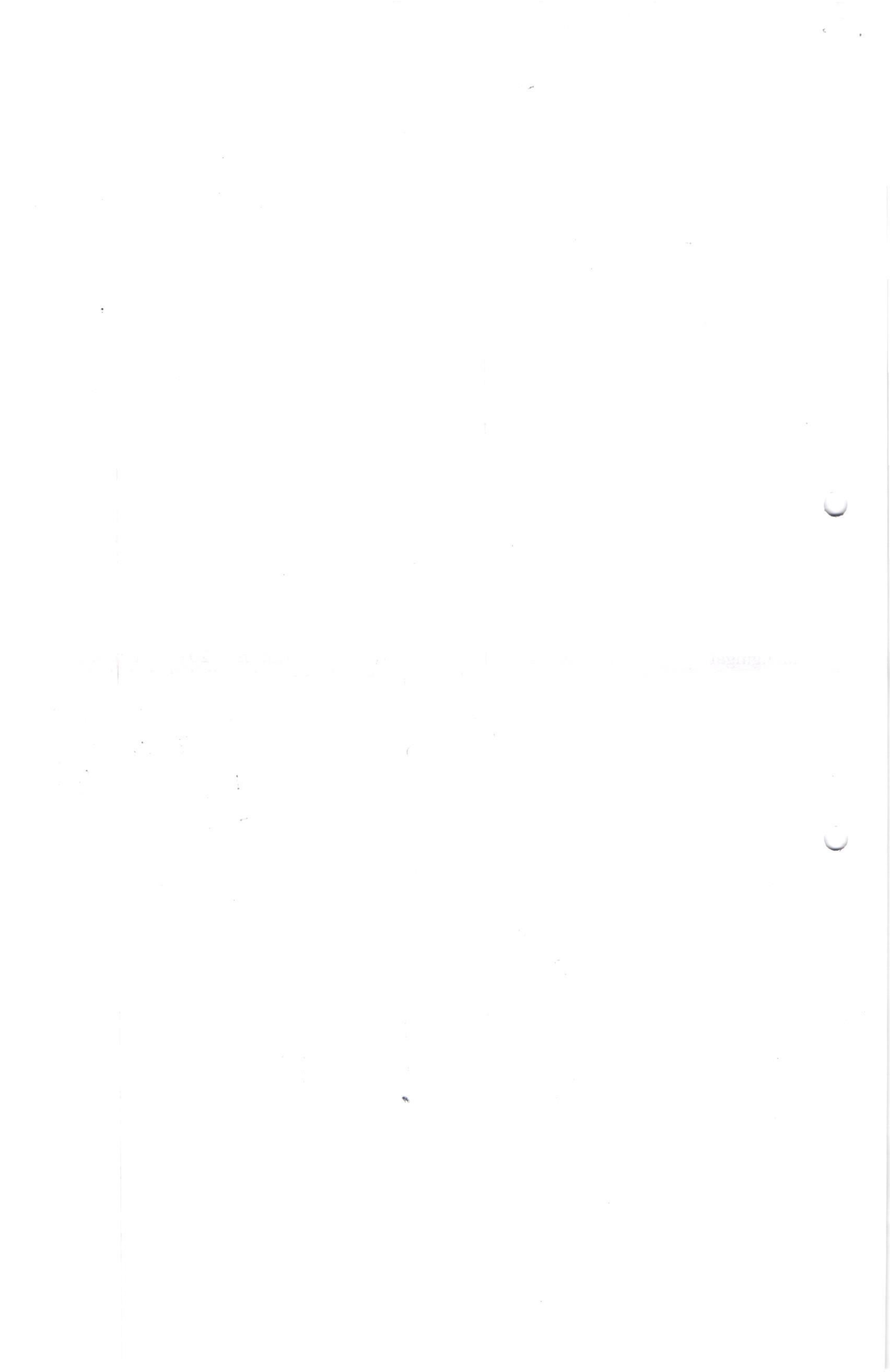
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Pelaksana Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Surat Pengantar Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800.1.1.1/1393/III.01/10/2024, tanggal 15 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/781/B.07/HK/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

100-100

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

W 082123

Main body of handwritten text, consisting of several lines of illegible script.

Handwritten text at the bottom right of the page.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ *792* /B.07/HK/2024
 TANGGAL : *28-u* 2024

**REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA
 PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	1	1.421	1	0	A		
2	KEPALA BAGIAN UMUM	1	1.233	1	0	A	2,957	A
3	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	6.114	6	-2	A		
4	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	7.759	8	-6	A		
5	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	2	2.064	2	0	A		
6	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2.064	2	-2	A		
7	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	0.848	1	-1	C		
8	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	1	1.041	1	0	A		
9	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	5.791	6	-4	A		
10	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	2.407	2	-1	A		
11	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	3	4.718	5	-2	A		
12	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	3.358	3	-3	A		
13	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	1.339	1	-1	A		
14	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	0.848	1	-1	C		
15	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	1	1.295	1	0	A	7,565	A
16	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	9	15.912	16	-7	A		
17	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	0.754	1	-1	C		
18	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	4	12.697	13	-9	A		
19	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	7.904	8	-8	A		
20	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	0.556	1	-1	D		
21	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN	1	1.208	1	0	A	20,481	A
22	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	18	32.802	33	-15	A		
23	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	5	9.414	9	-4	A		
24	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	14	27.165	27	-13	A		
25	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	12.544	13	-13	A		
26	KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	1	1.295	1	0	A	4,804	A
27	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	3	5.541	6	-3	A		
28	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	8.247	8	-6	A		
29	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	3	3.336	3	0	A		
30	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	1.912	2	-1	A		
31	DOKUMENTALIS HUKUM	1	1.448	1	0	A		
32	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	3	7.407	7	-4	A		
33	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	5.734	6	-6	A		
34	KEPALA BAGIAN FASILITASI ASPIRASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	1	1.235	1	0	A	10,878	A
35	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	9	18.119	18	-9	A		
36	PENATA KEPROTOKOLAN	7	10.261	10	-3	A		
37	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	3.714	4	-4	A		
38	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	6	17.796	18	-12	A		
39	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	10.753	11	-11	A		
40	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	4.624	5	-5	A		
		106	261.672	264	-158		46,685	A

Pj. GUBERNUR LAMPUNG

SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /B.07/HK/2024
 TANGGAL : 2024

**2.1 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG	
Hj. TINA MALINDA, S.Sos.,MM Pembina Utama Madya NIP. 19650725 198610 2 002	
KEPALA BAGIAN UMUM	MIRWAN PRATAMA, S.STP.,M.Si
KEPALA BAGIAN KEUANGAN	ANTHONI, SE.,MM
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN	IBNU HAJAR, SH.,MH
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	SUKARTINI, S.AP.,MM
KEPALA BAGIAN FASILITASI ASPIRASI, HUMAS DAN PROTOKOL	HENDRI ATMAJAYA, S.Sos.,MH
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	MONA MONICA ANDRIANI, S.S
PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	1. ABDI AMIR, SE.,MM 2. AZMEIDI HENDRA, S.Kom 3. DWI ARYANI, SE 4. EVI GUSTIANA, SE.,MM 5. AMINAH, S.Sos 6. YUDENTI, SE.,MM 7. NURHADIANSYAH, S.Sos 8. MELIA SANTI, SH 9. YUSMANTO, S.A.P
PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	1. SRI MUNINGSIH, SH 2. YULI SALTIN, S.Pd 3. DESSY ISTIARINI, SH.,MH 4. ROMILA, SE 5. RAHMAD DONI, SE 6. MUKHAYANI PRABANDARI, SH 7. PARYANTI SARI, SH.,MH 8. BUDDI FIRMANSYAH, SH 9. HERYANTI FITRI, S.Sos.,MM 10. RISMAWATI, S.Sos 11. SONI WIJAYA, SE.,MM 12. WAN INCI SITI AININ, SH 13. EVA ELMAINI, SE 14. HARUN RASYID, S.Ag 15. ACHMAD CHAIRUN ARSYITA S.St.Pi.,MH 16. LETTY RESTYANA, SE.,MM 17. RICHO, S.STP 18. M. REYNALDO RAHMAWAN, S.STP.,M.Si
PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	1. SUNARSIH, SH.,MH 2. ANNA EKAWATI ADAM, SH.,MH 3. ARIANTO RISKY NUGROHO, SH
PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	1. SUTANTO, SE 2. DARA DASIH, S.STP.,MM 3. JOKO PURWANTO, SH 4. INGE IMMELIA, SE.,MM 5. DEDDY KURNIAWAN, S.Sos.,MH 6. IKA DESTRYKA, SE.,MM 7. FARADHITYA MARSHA, S.STP 8. ABDUL RACHMAN, SH 9. BENI MUSTOFA, SH

<p>PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ARI CHANDRA, SH.,MH 2. MELDA HARIANI N, S.Akun 	<p>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI</p> <p>BELUM ADA PEGAWAI</p>	<p>PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GITA PANLELA, SE 2. ROHALIM, S.Sos 3. TRI AGUSTINA, SE 4. REIN MARTIN, SE.,M.Si 5. NAZIRHAN, SH 	<p>PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAY KARIM, SH.,MH 2. TIKA OKTAVIANI, SH.,MH 	<p>PENATA KEPROTOKOLAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FERDINAN INDIART, SH 2. ERWIN M.IKHSAN, SH.,MH 3. MUHAMMAD FIRMASYAH, SE.,MM 4. EMILDASARI ASTUTI, S.Sos 5. PARIANTAMA, SE.,MM 6. HARI AGUSMAN, SH.,MH 7. BAMBANG ADIWIJAYA, S.Kom
<p>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI</p> <p>SITI CHAIRUNISSA, A.Md</p>	<p>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SAHARA 2. IMAM SANTOSO NM 3. ARYATI 4. RETNO HANDAYANI 	<p>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ANDI AMRIN 2. HERMANSYAH 3. ELWANI 4. PANTO WILOPO 5. RUDI OKTAVIA 6. HERMANSYAH 7. FAUZIAH 8. BENY MULIA 9. ALI SADIKIN 10. RISTIawan 11. METEOR SAMSUDIN 12. NOVERIA 13. YUNERI 14. SUGIANTO 	<p>PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RIZKY ALAMSYAH, SH.,MH 2. AHMAD SESTIADI, SH.,MH 3. M. BERLIAN ICHSAN, S.Sos.,MM 	<p>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI</p> <p>BELUM ADA PEGAWAI</p>
<p>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AGUS SETIAWAN 2. JAMSURI AMRAN 3. SAMIASIH 	<p>PENATA LAYANAN OPERASIONAL</p> <p>BELUM ADA PEGAWAI</p>	<p>PENATA LAYANAN OPERASIONAL</p> <p>BELUM ADA PEGAWAI</p>	<p>PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI</p> <p>ABDUL HARIS, SH</p>	<p>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VERYY ARYAN 2. AIDA MUSTAFA 3. SYARIF HIDAYAT 4. YUSRIZAL 5. FIFI DESNATALIA 6. MOHAMAD DAMANHURI

PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
BELUM ADA PEGAWAI	BELUM ADA PEGAWAI
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	
BELUM ADA PEGAWAI	
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	
BELUM ADA PEGAWAI	

DOKUMENTALIS HUKUM	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
EVI MURLIATI, BA	BELUM ADA PEGAWAI
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
1. FITRIYANSA 2. HENDRA 3. REBUDIN	BELUM ADA PEGAWAI
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	
BELUM ADA PEGAWAI	

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
1. KUSNADI, S.Sos 2. REZA INDARSA H, S.STP.,M.Si 3. RISNAWATI, SH 4. SUBIYANTO, S.Sos

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
1. TUGI WALUYO 2. ERNAWATI

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
1. ROSNAWI 2. RIDUAN

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
BELUM ADA PEGAWAI

PENGELOLA UMUM OPERASIONAL
BELUM ADA PEGAWAI

Pj. GUBERNUR LAMPUNG

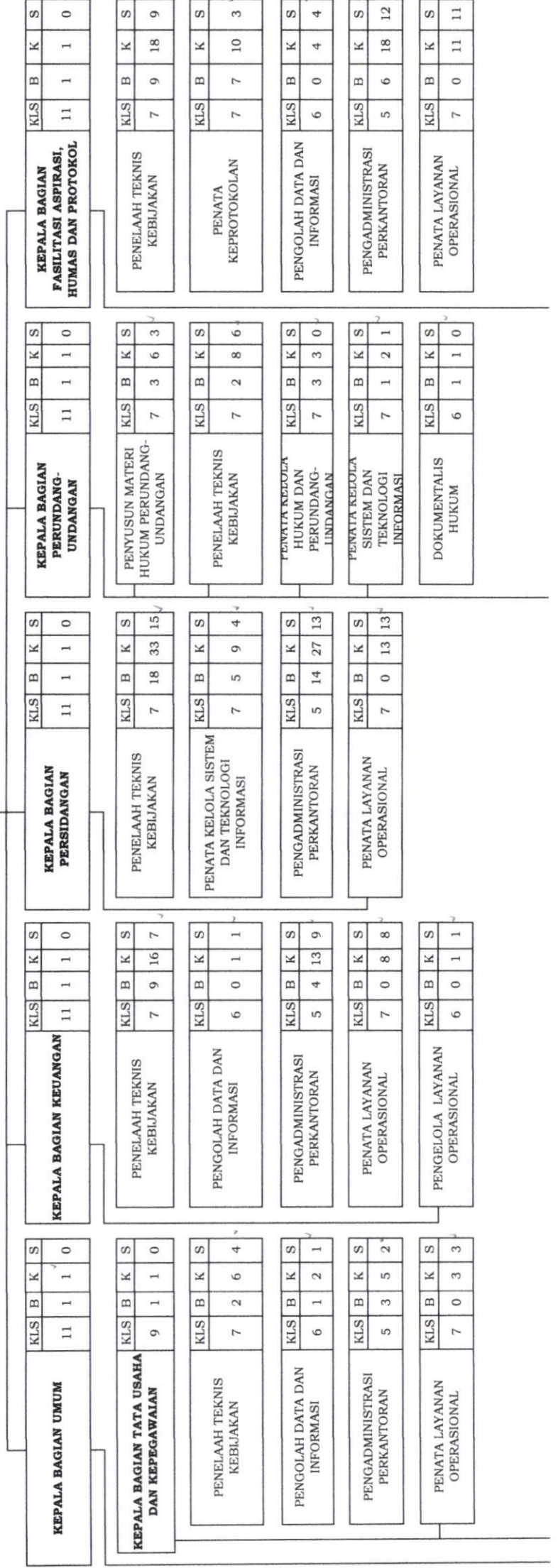
SAMSUDIN

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /B.07/HK/2024
 TANGGAL: 2024

3.1 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG			
KLS	B	K	S
15	1	1	0

KELAS JABATAN			
KELAS 15	1	1	0
KELAS 11	5	5	0
KELAS 9	1	1	0
KELAS 7	63	160	97
KELAS 6	2	15	13
KELAS 5	34	80	46
KELAS 1	0	2	2
JUMLAH	106	264	158



PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KLS	B	K	S
	6	0	1	1
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KLS	B	K	S
	1	0	1	1
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	KLS	B	K	S
	7	4	6	2
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KLS	B	K	S
	5	2	8	6
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KLS	B	K	S
	5	2	2	0
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	KLS	B	K	S
	7	0	2	2
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KLS	B	K	S
	1	0	1	1

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KLS	B	K	S
	5	3	7	4
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	KLS	B	K	S
	7	0	6	6

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KLS	B	K	S
	6	0	5	5

Pj. GUBERNUR LAMPUNG



SAMSUDIN